

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah pelaksana pemerintahan di daerah. Adanya kebijakan desentralisasi maka pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Muluk (2009:67) menjelaskan bahwa:

Elemen yang terkandung dalam rentang pengertian *local government* merupakan konsekuensi dari adanya desentralisasi dalam arti sempit (devolusi). Dalam hal ini *local government* dapat dimaknai menjadi tiga hal. Pertama, sebagai pemerintah daerah yang mengacu pada organ yang melaksanakan urusan dan fungsi yang didesentralisasikan. Kedua, sebagai pemerintahan daerah yang mengacu pada fungsi yang dijalankan dalam kerangka desentralisasi. Dan ketiga, sebagai daerah otonom tempat dimana lokalitas berada dan membentuk kesatuan hukum sendiri meskipun tidak berdaulat tetapi memiliki hak untuk mengurus dirinya sendiri.

Adanya pemberian otonomi kepada daerah, pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dengan mengutamakan penyerahan kepada pemerintahan tingkat kota/kabupaten untuk diatur dan diselenggarakan sebagai urusan rumah tangganya. Di dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud pemerintah daerah adalah :

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Di dalam UU No 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Namun tidak semua urusan menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam pasal 10 ayat 3 disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat meliputi :

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional;
- f. Agama.

Selain itu Pemerintah Daerah melaksanakan dua jenis urusan pemerintah yaitu urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 dan 14 Undang-Undang No 32 Tahun 2004, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan daerah kota/kabupaten ada 16 urusan meliputi :

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;

- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan urusan pemerintahan provinsi dan pemerintah daerah kota/kabupaten yang bersifat pilihan antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata. Dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah. Hal ini mempunyai maksud bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat disemua daerah.

Oleh sebab itu, hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah harus dimaksimalkan sebaik mungkin agar daerah akan lebih mampu mengelola apa saja yang menjadi keunggulan pada setiap daerah. Kebijakan otonomi daerah dilakukan agar pemerintah daerah mampu melaksanakan urusan pemerintahan daerah secara mandiri, pelayanan maksimal kepada masyarakat dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki daerah demi kesejahteraan masyarakat.

2. Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologi, otonomi daerah berasal dari “*autos*” yang artinya sendiri dan “*nomos*” (bahasa Yunani) yang berarti aturan. Sehingga gabungan

kedua akar kata tersebut dimaknakan sebagai “memerintah sendiri” atau “pemerintahan sendiri” kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri. Jadi otonomi daerah, daerah berwenang membuat aturan-aturan yang berlaku dalam batas wilayah itu sendiri tanpa keluar dari undang-undang yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam UU No 32 Tahun 2004 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada Pasal 21 Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pimpinan daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membahas tentang otonomi daerah tidak bisa terlepas dari konsep desentralisasi karena otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi. Desentralisasi menurut Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 32 Tahun 2004, diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Ratnawati (dalam Karim, 2003:76-77) secara klasik ada 4 bentuk pokok dari desentralisasi adalah sebagai berikut :

1. Dekonsentrasi, adalah pengalihan beberapa wewenang atau tanggung jawab administrasi di dalam (*internal*) suatu kementerian atau jawatan. Disini tidak ada transfer kewenangan yang nyata. Bawahan menjalankan kewenangan atas nama atasannya dan bertanggung jawab kepada atasannya.
2. Delegasi, adalah pelimpahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi-organisasi di luar struktur birokrasi pemerintah dan dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat.
3. Devolusi, pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintahan di tingkat lokal oleh pemerintah pusat dengan kontrol pusat seminimal mungkin dan terbatas pada bidang-bidang tertentu saja.
4. Privatisasi/Debirokratisasi, adalah pelepasan semua tanggung jawab fungsi-fungsi kepada organisasi-organisasi pemerintah atau perusahaan-perusahaan swasta.

Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pusat diserahkan pada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat merespon langsung tuntutan dari masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan daerah. Karena kewenangan dalam membuat kebijakan (peraturan daerah) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai otonomi daerah, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan sebagai pemberian hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah mendorong agar daerah berkewajiban dalam melaksanakan pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan otonomi daerah pemerintah daerah harus mampu membangun kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat menetapkan strategi pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdaya guna.

B. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan pada dasarnya lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. Dalam proses pembangunan harus didukung dengan administrasi yang baik dan benar agar pencatatan dan pengaturan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu pertama tentang administrasi dan kedua tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara sadar oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national-buiding*) (Siagian, 2003:4). Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka menurut Siagian

administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Administrasi pembangunan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa (Tjokrohamidjojo, 1976:13). Sementara itu menurut Riggs (1986:77) administrasi pembangunan tidak berarti hanya sebagai usaha-usaha pemerintah melaksanakan program-program terencana dalam rangka membentuk lingkungan fisik, manusia dan kebudayaannya, tetapi juga berarti perjuangan meningkatkan kemampuan melaksanakan berbagai program pembangunan. Sehingga dalam proses administrasi pembangunan pemerintah merencanakan program-program pembangunan yang terarah demi kemajuan dan peningkatan menjadi lebih baik.

Bintoro Tjokrohamidjojo (1976:14) mengungkapkan bahwa ruang lingkup Administrasi Pembangunan mempunyai dua fungsi yaitu : pertama, penyusunan kebijakan penyempurnaan Administrasi negara (*the development of administration*). Dalam hal ini usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, tata kerja dan pengurusan sarana-sarana administrasi lain. Kedua, penyempurnaan administrasi untuk mendukung (a) perumusan kebijakan dan program-program pembangunan, serta (b) pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan secara efektif. Administrasi

pembangunan tidak hanya digunakan untuk menetapkan strategi pembangunan yang baik, namun rencana-rencana yang telah disusun dapat di laksanakan secara efektif oleh pemerintah dan kerjasama seluruh masyarakat dalam proses pembangunan serta sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.

Administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan (Riggs, 1986:75). Upaya dan kegiatan pembangunan merupakan suatu upaya nasional yang artinya menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajaranya, namun peran serta dari swasta dan masyarakat. Pembangunan merupakan urusan semua pihak dalam suatu masyarakat bangsa. Pembangunan dilakukan atas kemauan untuk lebih memajukan bangsa atau negara untuk bersaing dengan negara-negara lain.

Ciri-ciri pendekatan administrasi pembangunan (Tjokrohamidjojo, 1976:11) adalah :

1. Orientasi kepada usaha-usaha ke arah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong ke arah perubahan-perubahan besar (*basic changes*) di berbagai kegiatan/bidangkehidupan yang saling terkait dan akan memberikan hasil akhir terdapatnya proses pembangunan.
2. Perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Administrasi pembangunan merupakan penyempurnaan administrasi publik yang diarahkan untuk lebih mendukung usaha-usaha pembangunan. Di dalam administrasi pembangunan peran dan partisipasi masyarakat merupakan

fungsi penting bagi keberhasilan pembangunan, dalam arti untuk keperluan keberhasilan pembangunan yang meliputi administrasi untuk perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Administrasi pembangunan merupakan suatu proses secara keseluruhan dan terencana dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan dukungan dari swasta dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

C. Pembangunan Pertanian

1. Pengertian Pertanian

Pertanian merupakan sektor terbesar pada negara-negara berkembang. Sektor ini sebagai penghasil pangan penduduk, memberikan lapangan pekerjaan, bahan baku industri dan juga tentunya sumber devisa negara. Pertanian dalam arti kata luas meliputi semua kegiatan usaha dalam reproduksi flora dan fauna yang dibedakan ke dalam 5 sektor, masing-masing pertanian rakyat, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan (Moeljadi, 1996:12). Sedangkan dalam arti sempit menurut Mosher (dalam Moeljadi, 1996:12), pertanian adalah sejenis proses reproduksi yang khas yang didasarkan atas proses-proses pertumbuhan tanaman dan hewan, para petani mengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan itu dalam usaha tani (*Farm*). Pertanian merupakan kegiatan manusia dalam bercocok tanam, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan yang di dalamnya manusia sebagai pelaku usaha tani.

Pertanian timbul ketika manusia mulai mengendalikan/menguasai pertumbuhan tanaman-tanaman dan hewan-hewan itu dengan mengaturnya

demikian rupa sehingga menguntungkannya. Perbedaan antara petani yang ilmiah dan primitif terletak pada taraf sampai dimana penguasaan ini terlaksana (Mosher, 1965:20). Pertanian primitif lebih menerima keadaan tanah, curah hujan dan berbagai varietas tanaman yang apa adanya. Sedangkan pertanian ilmiah, manusia mempergunakan kecerdasannya untuk menguasai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan maupun hewan. Penerapan irigasi, penggunaan pupuk digunakan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.

Sektor pertanian merupakan tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Selain sebagai penghasil bahan makanan pokok, sektor pertanian juga menjadi penciptaan lapangan kerja yang produktif. Di Indonesia pengertian pertanian dalam arti kata luas lebih dititik beratkan terutama pada produksi yang dihasilkan, bila produksi utamanya kayu menjadi kehutanan, bila produksi utamanya ikan menjadi perikanan, bila produksi utamanya ternak menjadi peternakan, bila produksi utamanya tanaman menjadi perkebunan dan khusus bagi pertanian rakyat maka titik berat ditekankan pada usaha tani di pedesaan.

Pertanian masih merupakan identitas utama kegiatan ekonomi di negara dunia ketiga. Pembangunan dunia ketiga selalu diawali dengan usaha peningkatan pendapatan masyarakat dengan jalan melakukan pendapatan peningkatan pendapatan negara. Negara dunia ketiga sebagian merupakan negara dengan basis perekonomian agraris sebagaimana Indonesia, sehingga pembangunan di Indonesiapun tidak mungkin melepaskan pembangunan pertanian dalam seluruh kebijakan pembangunan nasional. Bahkan sudah

seharusnya menjadikan prioritas utama dalam pembangunan (Hanani dkk, 2003:29). Indonesia sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai komoditi utama dalam peningkatan pendapatan negara dikarenakan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangat mendukung untuk peningkatan di sektor pertanian.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak. Kebijakan untuk meningkatkan peran pertanian dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia tertuang dalam berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan dengan usaha memodernisasi pertanian yang salah satunya melalui BIMAS (Bimbangan Massal) dalam gerakan revolusi hijau pemerintah menjadikan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian bangsa.

2. Pertanian Tanaman Pangan

Meskipun pada pada saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan begitu pesatnya, sektor pertanian sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia, disamping sektor-sektor kehidupan lainnya. Karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan makanan, maupun bahan baku bagi industri. Di samping itu pertanian juga berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan terutama bagi penduduk yang tinggal di pedesaan, dan juga masih merupakan sektor yang dapat diandalkan sebagai

penghasil devisa negara. Pertanian adalah jenis kegiatan produksi yang berasal dari proses pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sedangkan tanaman pangan itu sendiri adalah segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein. Jadi dapat disimpulkan jika pertanian tanaman pangan adalah proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan yang dapat menghasilkan sumber karbohidrat maupun protein. Hasil Pertanian tanaman pangan antara lain :

a. Padi

Padi (*Oryza sativa sp.*) adalah tanaman yang berasal dari Bangladesh. Dari tanaman padi dihasilkan beras, yang merupakan bahan makanan pokok hampir 95% rakyat Indonesia. Padi dapat tumbuh dengan baik di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

b. Jagung

Jagung (*Zea mays*) adalah jenis tanaman padi-padian yang berasal dari Amerika. Tanaman jagung sampai ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Spanyol. Jagung dapat tumbuh di daerah tropis maupun daerah sub tropis. Jagung ditanam di ladang, tegalan dan sawah pada musim kemarau. Kadang-kadang jagung juga ditanam sebagai tanaman sela/tumpang Sari di lahan perkebunan. Jagung tumbuh sangat baik di daerah berketinggian 0-1500 meter di atas permukaan air laut. Jagung merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian penduduk Nusa Tenggara Timur, Madura, dan Minahasa.

c. Ketela Pohon

Ketela pohon (*Manihot asculenta* atau *Manihot utilissima*) disebut juga ubi kayu atau singkong. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan. Ketela pohon banyak ditanam di lahan kering dengan jenis tanah yang gembur. Tanaman ini dapat hidup di daerah-daerah dengan musim kering yang lunak hingga sangat kering. Pada dataran rendah, ketela pohon banyak ditanam pada ketinggian 0-4500 meter di atas permukaan laut. Ketela pohon dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti beras atau jagung, khususnya bagi penduduk di Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta).

d. Ubi Jalar

Ubi jalar (*Ipomoea batatas*) adalah jenis tanaman semak yang berasal dari Hindia Barat. Tanaman ini sampai ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Spanyol. Ubi jalar cocok ditanam di daerah ketinggian 0-2000 meter di atas permukaan air laut. Ubi jalar disebut juga ketela rambat. Umbinya dapat dimakan dan merupakan makanan pokok penduduk Papua Bagian Tengah. Bagi penduduk daerah lain di Indonesia, ubi jalar merupakan tambahan. Daerah utama penghasil ubi jalar di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

e. Kedelai

Kedelai (*Soya max*) adalah tanaman semak yang termasuk jenis polong-polongan (kacang-kacangan). Kedelai banyak ditanam di daerah dengan ketinggian 5 – 1000 meter di atas permukaan laut. Kedelai ditanam di daerah kering, misalnya tegalan, ladang dan pekarangan. Kedelai juga ditanam

di sawah pada musim kemarau sebagai palawija. Kedelai merupakan salah satu sumber protein bagi penduduk Indonesia. Kedelai mengandung protein nabati dan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Daerah utama penghasil kedelai di Indonesia adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Nusa Tenggara Barat.

f. Kacang Tanah

Kacang tanah (*Arachis hypogea*) adalah tanaman yang berasal dari Brasil. Kacang tanah adalah tanaman palawija yang mengandung protein nabati. Kacang tanah banyak ditanam di tegalan, ladang dan pekarangan juga ditanam di sawah pada musim kemarau.

Tanaman pangan beragam jenisnya seperti padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, kedelai dan kacang tanah. Berdasarkan jenis-jenis tanaman pangan tersebut, padi merupakan tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh petani Kota Batu. Walaupun menjadi komoditas unggulan kedua setelah tanaman hortikultura, peningkatan produksi padi Kota Batu harus ditingkatkan karena kebutuhan pangan penduduk yang terus meningkat.

3. Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian adalah sebuah perubahan dari keadaan lama menjadi sebuah keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan dengan unsur-unsur pokoknya petani dan usaha tani. Secara keseluruhan pembangunan pertanian akan mengaitkan manusia baik petani maupun bukan petani dengan mengharapkan dukungan tiap-tiap sektor yang menunjang dan berhubungan dengan usaha-usaha pertanian. Pembangunan

pertanian pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi. Melayani dan mendorong berkembangnya sistem pertanian dan usaha-usaha pertanian yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertanian merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional dan implementasinya harus sinergis dengan pembangunan sektor lainnya. Pelaku pembangunan pertanian meliputi departemen teknis terkait, pemerintah daerah, petani, pihak swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya (Hanani dkk, 2003:79).

Pembangunan pertanian di masa yang akan datang dituntut untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi dan juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat petani. Tantangan-tantangan yang di hadapi dalam pembangunan pertanian pada saat ini dihadapkan pada semakin sempitnya lahan-lahan pertanian yang di alih fungsikan. Namun produk pertanian menjadi suatu komoditas unggulan tersendiri bagi masing-masing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Setiap melakukan pembangunan harus memiliki tujuan-tujuan yang ingin di capai. Tujuan pembangunan pertanian (Kementan. 2010) adalah:

- a) Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal.
- b) Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan.
- c) Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan.
- d) Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian.
- e) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Supaya pembangunan pertanian itu terlaksana, pengetahuan dan ketrampilan para petani haruslah terus meningkat dan berubah. Karena para petani terus-menerus menerima metoda baru, cara berfikir mereka pun berubah. Mereka mengembangkan suatu sikap baru yang berlainan terhadap pertanian, terhadap alam sekitar mereka dan terhadap diri mereka sendiri. Sukses yang mereka alami didalam meningkatkan produksi, mempertinggi rasa percaya kepada diri sendiri. Pembangunan pertanian merupakan produk masyarakat (Mosher, 1965:16). Bukan semata-mata hasil kerja petani saja, melainkan hasil kegiatan para petani beserta keluarganya serta para pihak yang terkait dengan pembangunan di sektor pertanian.

Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 merupakan acuan dan arahan pembangunan pertanian untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional melalui pencapaian 4 target utama pembangunan pertanian ke depan, yaitu :

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor
4. Peningkatan kesejahteraan petani.

Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pembangunan Pertanian di Indonesia (Hanani dkk. 2003:31) :

1. Potensi sumber dayanya yang besar dan beragam
2. Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar
3. Besarnya pangsa terhadap ekspor nasional
4. Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini

5. Perannya dalam penyediaan pangan masyarakat
6. Menjadi basis pertumbuhan di pedesaan

Potensi pertanian yang besar namun sampai saat ini sebagai besar dari petani banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pada masa lalu bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi sektor pertanian secara keseluruhan.

4. Unsur-Unsur Pembangunan Pertanian

Unsur-unsur dalam pembangunan pertanian terdiri atas petani dan usaha taninya. Meskipun hanya meliputi dua unsur pokok itu, namun dalam pelaksanaannya akan menyangkut banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan dengan berbagai bidang kehidupan. Secara garis besar, masalah-masalah yang menyangkut petani adalah bagaimana mengubah dan meningkatkan prilakunya dalam menuntut kemajuan, seperti bagaimana meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya, meningkatkan semangat dan gairah kerjanya, meningkatkan efisiensi segenap usaha-usahanya serta lain-lain, yang secara ringkas dapat dirumuskan sebagai terus menerus menciptakan perubahan-perubahan sosial/struktur sosial terhadapnya (Moeljadi, 1996:29). Jika dikaitkan dengan usaha tani maka petani yang memiliki kemauan untuk maju dan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang dimilikinya akan memberikan keuntungan secara ekonomi bagi petani itu sendiri.

Mosher (dalam Moeljadi, 1996:32) membagi unsur-unsur pembangunan pertanian dalam dua bagian yaitu :

1. Syarat-syarat pokok/mutlak, karena dianggapnya mutlak agar pembangunan pertanian dapat berlangsung. Syarat-syarat pokok/mutlak pembangunan pertanian adalah :

- a. Terjaminnya pasaran untuk hasil-hasil usaha tani
 - b. Adanya teknologi yang selalu berubah
 - c. Tersedianya sarana produksi setempat (secara lokal)
 - d. Adanya perangsang produksi bagi petani
 - e. Pengangkutan
2. Faktor-faktor pelancar, karena sifatnya tidak mutlak dan merupakan penunjang bagi syarat-syarat pokok/mutlak. Faktor-faktor pelancar pembangunan pertanian adalah :
- a. Pendidikan pembangunan
 - b. Kredit produksi
 - c. Kegiatan gotong royong
 - d. Perbaikan dan perluasan tanah pertanian
 - e. Perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian

Dengan demikian, tanpa adanya syarat-syarat pokok/mutlak, pembangunan pertanian tidak dapat berlangsung meskipun lengkap tersediannya faktor-faktor pelancar. Pembangunan pertanian akan tetap berlangsung asalkan tersedia syarat-syarat pokok/mutlaknya walaupun tidak adanya faktor-faktor pelancar. Akan lebih baik jika tersedianya syarat-syarat pokok/mutlaknya maupun faktor-faktor pelancar agar pembangunan pertanian akan berjalan dan berkembang lebih pesat.

5. Syarat-Syarat Pengembangan Pertanian

Pertanian merupakan identitas bagi negara dunia ketiga, pengembangan pertanian salah satunya dilakukan dengan meningkatkan produktifitas pertanian. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan dan mengembangkan pertanian kearah lebih baik, antara lain (Hanani dkk, 2003:81) :

a. Kelestarian Lingkungan

Pertanian merupakan sebuah usaha yang bergantung pada alam. Meski dapat direkayasa dengan teknologi namun sebagian besar alam masih menjadi faktor penentu dalam pengembangan pertanian. Agar kualitas dan

produktivitas pertanian dapat terpelihara dalam jangka panjang, maka usaha pertanian yang dikembangkan harus mampu dalam mengakomodir aspek kelestarian lingkungan dalam seluruh rangkaian kegiatannya. Bentuk dari akomodasi tersebut adalah melakukan usaha tani yang ramah lingkungan dan juga memperhatikan korbanan lahan sehingga masukan pada lahan juga kita usahakan sebanding dengan korbanannya.

b. Dukungan Kelembagaan Agribisnis

Dalam pengembangan pertanian selama ini belum terpola, pembinaannya tersekat-sekat dan struktur agribisnisnya bersifat dispersal. Struktur pertanian dispersal dicirikan oleh tidak adanya hubungan organisasi fungsional diantara setiap tingkatan dan jaringan pertanian hanya diikat dan dikoordinir oleh mekanisme pasar (Harga). Struktur pertanian yang diperlukan adalah pertanian industrial yang merupakan proses konsolidasi usaha tani disertai dengan kordinasi vertikal diantara seluruh tahapan vertikal agribisnis.

c. Teknologi Strategis Berbasis Lokal

Keberhasilan pengembangan pertanian dalam usaha pertanian yang dilakukan, sangat ditentukan oleh kemampuan dalam penyediaan dan penerapan IPTEK. Terobosan inovasi teknologi baru strategis berbasis lokal dilakukan melalui program penelitian pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi sumber daya lahan, air, iklim dan hayati.

d. Pendayagunaan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati

Keanekaragaman hayati di Indonesia yang melimpah masih bersifat semu karena baru berupa potensi sedangkan kemampuan untuk menggali,

memanfaatkan dan memngembangkan berdasarkan teknologi muktahir, belum optimal. Tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi merupakan dasar untuk meningkatkan daya saing produk pertanian. Semakin teridentifikasinya berbagai kekayaan alam dan maksimalisasi smber daya alam maka rekayasa genetika dan teknologi lain untuk meningkatkan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

e. Sistem Informasi Pertanian Yang Tangguh

Pengembangan sistem informasi pertanian memerlukan dukungan data yang akurat, sistem informasi, layanan data, dan informasi pertanian yang baik. Dengan sistem informasi yang baik akan dapat dilakukan pemantauan dan penyebarluasan informasi pertanian secara cepat, akurat dan murah. Pengembangan sistem informasi pertanian dilakukan untuk kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian baik dari Kementerian Pertanian, antara pusat dan daerah, antara daerah dan lintas sektoral termasuk swasta.

6. Tantangan Pembangunan Pertanian

Dengan semakin berjalannya waktu, tantangan dalam pembangunan pertanian sangatlah beragam terutama dalam pembangunan pertanian yan tangguh dan berkelanjutan. Tantangan-tantangan yang mewarnai pembangunan pertanian di masa sekarang dan yang akan datang adalah sebagai berikut (Solahuddin, 2008:62-64) :

- a. Transformasi struktural, permasalahan pertanian pada masa datang tidak terlepas dari permasalahan ketenagakerjaan nasional. Dalam kaitan ini tantangannya adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha

pertanian dalam bentuk pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat pedesaan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk mekanisasi pertanian dan bioteknologi.

- b. Migrasi sektoral dan spasial, terletak pada upaya pengurangan atau penghentian laju urbanisasi (terlebih yang premateur) yang menyebabkan masyarakat desa masuk ke sektor informasi perkotaan. Tantangannya adalah menciptakan daya tarik pedesaan melalui pengembangan kebijakan pertanahan dan investasi yang mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan tenaga kerja pertanian serta meningkatkan ketahanan ekonomi pedesaan, melalui pengembangan agribisnis pedesaan, khususnya agroindustri sebagai motor peningkat produktivitas kerja dan peningkatan nilai tambah, yang dapat menarik minat penduduk untuk tetap tinggal di pedesaan.
- c. Pemenuhan kebutuhan pangan, untuk produk pertanian yang memiliki nilai strategis tidak ada pilihan lain selain swasebada pangan. Tantangannya adalah menciptakan kemampuan akselerasi peningkatan produksi dalam hal memenuhi kebutuhan pangan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan industri.
- d. Pemilikan lahan yang sempit. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian saat ini kurang dari 0,5 Hektar. Dengan keterbatasan lahan tersebut tantangannya harus menciptakan sistem pengelolaan lahan yang mampu menjamin petani memenuhi skala usaha yang efisien, dan menciptakan situasi kondusif agar terjadi konsolidasi penguasaan dan pengusahaan lahan oleh petani.
- e. Kebutuhan investasi dan permodalan. Peran lembaga keuangan dalam menyediakan permodalan di sektor pertanian masih dirasakan kurang. Tantangan yang harus dihadapi bukan pada apakah alokasi kapital dilaksanakan melalui mekanisme pasar atau tidak, akan tetapi bagaimana membangun prakondisi sektor pertanian yang mendorong investasi di sektor pertanian semakin menarik.
- f. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sektor pertanian harus berupaya memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai teknologi pertanian, termasuk bioteknologi yang paling mutakhir. Dukungan permodalan, penyuluhan, peningkatan sumber daya aparat, peneliti dan petani perlu terus ditingkatkan.
- g. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) pertanian. Rendahnya kualitas tenaga kerja menyebabkan rendahnya efisiensi usaha tani di pedesaan. Tantangannya adalah bagaimana mempersiapkan SDM pertanian agar mampu menerapkan teknologi pertanian dalam kegiatan usaha pertaniannya.
- h. Pengembangan diversifikasi pertanian. Diversifikasi merupakan suatu keharusan. Kunci sukses diversifikasi adalah pengembangan teknologi disertai dengan pengembangan kelembagaan pendukung yang memadai. Diversifikasi diharapkan berkembang bukan hanya dalam kegiatan produksi, tetapi juga dalam pemasaran dan pengelolaan hasil.

- i. Kerusakan lingkungan. Fenomena-fenomena kerusakan lingkungan dewasa ini dalam bidang pertanian dikarenakan pencemaran tanah dan air akibat penggunaan bahan kimia yang melampaui batas, akumulasi pestisida dalam bahan makanan dan buah-buahan, hingga kerusakan gen manusia, merupakan dampak dari usaha-usaha manusia mengeksploitasi alam. Dalam bidang pertanian dilakukan sistem pertanian organik baik tanaman pangan maupun hortikultura. Dengan demikian diharapkan akan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan aman dikonsumsi.

D. Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata “strategi” adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *strategos*. Adapun *strategos* dapat diterjemahkan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena. Dewasa ini strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi privat mempunyai sejumlah langkah-langkah atau cara yang disusun secara sistematis dalam rangka menjalankan segala aktivitas kegiatan. Langkah-langkah tersebut merupakan rangkaian kebijakan yang dituangkan dalam bentuk strategi. Strategi merupakan rangkaian dari perencanaan suatu kegiatan, yang meliputi berbagai kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pengertian strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:964) adalah :

- a. Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.
- b. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan.
- c. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus.
- d. Tempat yang baik menurut siasat perang.

Sedangkat konsep strategi oleh para ahli yang dikutip Rangkuti (2004:3) adalah sebagai berikut :

- a. Chandler (1962) :
Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya
- b. Learned, Christensen, Andrews dan Guth (1965)
Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada.
- c. Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steiner dan Miner (1977)
Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Selanjutnya pengertian strategi menurut Kusdi (2009:87) penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut. Menurut Nurjaman dan Hadi (2003:101) Strategi digunakan untuk menciptakan fokus, konsistensi, fungsi untuk sebuah organisasi dengan rencana-rencana yang menghasilkan cara-cara, pola-pola, posisi-posisi dan perspektif yang mengarah dalam pelaksanaan strategi. Sedangkan menurut Suryono (2004:80) strategi adalah

Strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan : kebijakan, penentuan tujuan yang hendak dicapai dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-sarana tersebut. Strategi selalu berkaitan dengan tiga hal utama yaitu tujuan (*ends*), sarana (*means*) dan cara (*ways*). Untuk menetapkan sasaran strategis digunakan metode SMART (sebagai singkatan dari *specific, measurable, achievable, relevant* dan *timed*). Oleh karena itu strategi perlu didukung oleh suatu kemampuan (*capability*) untuk meningkatkan kesempatan dan peluang yang ada.

Dari beberapa definisi strategi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa strategi merupakan suatu gagasan, perencanaan secara menyeluruh sebagai suatu

program atau kebijakan yang disusun dengan pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan dan menjalankan tujuan dan misi organisasi dilakukan secara efektif dalam pelaksanaannya.

2. Tingkat-Tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins yang dikutip oleh Salusu (1996:101-104) dijelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keempat tingkatan strategi tersebut saling mendukung satu sama lain, dan keempat tingkatan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Enterprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Respons terhadap keinginan masyarakat perlu diberi perhatian dengan pertimbangan-pertimbangan etis.

b. *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi sehingga sering disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Dalam organisasi ini bagaimana cara yang dilakukan untuk menjalankan misi mempunyai peran yang penting. Dan hal ini memerlukan keputusan-keputusan

strategik dan perencanaan strategik yang selayaknya juga disiapkan oleh organisasi.

c. Business Strategy

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para anggota legislatif, para donor, para politisi, dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan strategik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ketingkat yang lebih baik. Dalam istilah bisnis, startegi ini memusatkan perhatian pada *keunggulan kompetitif* yang untuk kalangan nonprofit lebih disukai menggunakan istilah *keunggulan komparatif*.

d. Functional Strategy

Strategi ini merupakan startegi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:

1) Strategi fungsional ekonomi

Yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keungan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan;

2) Strategi fungsional manajemen

Mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu *planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing, dan integrating*;

3) Strategi isu strategik

Fungsi utamanya adalah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah.

3. Syarat-Syarat dan Manfaat Strategi

Orientasi strategi adalah bertumpu pada implikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Agar penyusunan strategi dapat berjalan dengan tepat sasaran dan diimplementasikan secara efektif, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan strategi (Siagian, 2002:102), yaitu:

- a. Strategi yang harus dirumuskan harus mampu disatu pihak memperoleh manfaat dan berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan di pihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif atau bahkan berupa ancaman bagi organisasi dan kelangsungannya.
- b. Strategi harus diperhitungkan secara realistis kemampuan suatu organisasi dalam menyediakan berbagai daya, sarana, prasarana dan dana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan strategi tersebut.
- c. Strategi yang telah ditentukan dioperasionalkan secara teliti. Tolak ukur tepat tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusannya saja, akan tetapi juga mencakup pada operasional atau pelaksanaannya.

Dalam penyusunan strategi dalam suatu organisasi harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar strategi dapat dijalankan secara optimal dan tepat sasaran pada suatu organisasi. Peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dalam organisasi harus dapat diprediksi dengan baik agar organisasi dapat memaksimalkan peluang yang ada dan meminimalisir ancaman yang terjadi pada suatu organisasi.

Strategi ditetapkan oleh suatu organisasi sebagai kelanjutan dari perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Penentuan strategi ini tentunya tidak terlepas dari rantai kegiatan yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

David (2002:15) mengungkapkan manfaat penetapan strategi pada organisasi antara lain :

- a. Aktivitas formulasi strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan.
- b. Membantu organisasi membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategis.
- c. Strategi merupakan sebuah proses bukan keputusan atau dokumen. Tujuan utama dari proses adalah mencapai pengertian dan komitmen dari semua manajer karyawan.
- d. Keterlibatan karyawan dalam formulasi strategi memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi dan demikian dapat mempertinggi motivasi kerja karyawan.
- e. Strategi memungkinkan untuk identifikasi, enentuan prioritas, dan eksploitasi peluang. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi serta memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana.
- f. Penerapan strategi membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka dan meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal/luar perusahaan serta pemahaman yang lebih baik mengenai strategi pesaing.

Strategi memungkinkan suatu organisasi untuk lebih proaktif ketimbang reaktif dalam membentuk masa depan sendiri dan membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Suatu organisasi menggunakan strategi sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah dan tidak merasa bingung dalam berpijak karena telah mempunyai garis besar rencana organisasi ke depan. Strategi dalam organisasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan atau kontinu (Kusdi, 2009:90). Di akhir tahap implementasi selalu diperlukan suatu evaluasi, yang berkaitan dengan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Pada gilirannya, hasil evaluasi ini akan menjadi bahan dalam penyusunan atau perbaikan strategi di masa selanjutnya.

4. Tipe –Tipe dan Jenis Strategi

Strategi dalam setiap organisasi diperlukan untuk merencanakan masa depan setiap organisasi. Strategi organisasi memiliki tipe-tipe yang mendukung dalam pengimplementasian strategi yang ditetapkan. Menurut Rangkuti (2007:6), pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu :

- a. Strategi Manajemen
Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi dan strategi pengembangan pasar.
- b. Strategi Investasi
Strategi ini merupakan strategi yang berorientasi pada investasi. Misalnya apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi divestasi.
- c. Strategi Bisnis
Strategi bisnis sering juga disebut strategi bisnis fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi, strategi distribusi atau strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

Sedangkan menurut Nawawi (2005:176), banyak teknik-teknik analisis strategi yang digunakan untuk memperoleh jenis-jenis strategi yang dapat diadaptasi dalam organisasi non-profit. Beberapa jenis strategi yang dapat digunakan dalam organisasi non profit, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Strategi Agresif
Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) mendobrak penghalang, rintangan atau ancaman untuk mencapai keunggulan atau prestasi yang ditargetkan.
- b. Strategi Konserpatif
Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) dengan cara yang sangat berhati-hati disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.
- c. Strategi Difensif
Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) untuk mempertahankan kondisi keunggulan atau prestasi yang sudah dicapai.

- d. Strategi Kompetitif
Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) untuk mewujudkan keunggulan yang melebihi organisasi non-profit lainnya yang sama posisi dan jenjangnya sebagai aparatur pemerintah.
- e. Strategi inovatif
Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) agar organisasi nonprofit selalu tampil sebagai pelopor pembaharuan dalam bidang pemerintahan khususnya dibidang tugas pokok masing-masing, sebagai unggulan atau prestasi.
- f. Strategi Diversifikasi
Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) berbeda dengan strategi yang biasa dilakukan sebelumnya, atau berbeda dari strategi yang dipergunakan organisasi profit lainya dibidang pemerintah dalam memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembangunan.
- g. Strategi Preventif
Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) untuk mengoreksi dan memperbaiki yang diperintahkan organisasi atasan.

Strategi yang akan diterapkan pada organisasi harus disesuaikan dengan karakter dan kemampuan organisasi. Perumusan strategi pada suatu organisasi lebih menitikberatkan pada keunggulan yang digeluti oleh organisasi tersebut. Kesuksesan strategi yang diterapkan akan menjadi dasar pemikiran baru dan inisiatif-inisiatif strategi baru untuk ke depannya.

5. Strategi Dalam Sektor Publik

Konsep strategi tidak hanya mempunyai nilai bagi organisasi-organisasi swasta untuk mengejar keuntungan, tetapi juga organisasi pemerintah dan organisasi nonprofit, terutama berkaitan dengan bagaimana dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategi pada sektor swasta tidak semua dapat dipraktekkan ide-ide maupun gagasan-gagasan akan bekerja baik pada sektor publik. Hal ini seperti

pandangan Nutt dan Backoff yang dikutip oleh Nurjaman dan Hadi (2003:107) menjelaskan bahwa :

Manager strategi dalam sektor publik akan berhati-hati menggunakan pendekatan-pendekatan sektor swasta tentang anggapan tujuan-tujuan yang jelas. Tujuan profit atau tujuan ekonomik, wewenang peraturan tak terbatas, pengembangan secara rahasia, tanggung jawab terbatas untuk tindakan-tindakan dan kelalaian hingga mekanisme pasar tentang sinyal hasil-hasil finansial dan dalam organisasi publik banyak pada asumsi ini yang tidak valid.

Perumusan awal strategi dalam sektor publik cenderung komit pada hal diatas. Bozeman dan Straussman (dalam Nurjaman dan Hadi, 2003:107) mengatakan strategi meliputi menghadapi lingkungan eksternal dan misi-misi serta tujuan-tujuan organisasi yang luas. Mereka berpendapat bahwa ada ciri-ciri utama dari sebuah pendekatan strategik, mendefinisikan tujuan dan sasaran pengembangan tindakan perencanaan tentang media-media antara organisasi dan lingkungan serta mendesain metode implementasi yang efektif.

6. Strategi Pembangunan Pertanian Indonesia

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Dalam pembangunan pertanian periode 2010-2014, Kementerian Pertanian membuat strategi yaitu Tujuh Gema Revitalisasi adalah sebagai berikut :

a. Revitalisasi Lahan

Ketersediaan sumberdaya lahan, termasuk air, yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas merupakan faktor yang sangat fundamental bagi pertanian. Lahan dan air sebagai media dasar tanaman harus dijaga kelestariannya agar sistem produksi dapat berjalan secara berkesinambungan.

Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dalam revitalisasi lahan :

- a. Ketersediaan lahan pertanian
- b. Kesuburan lahan pertanian
- c. Kepemilikan dan status lahan
- d. Ketersedian air pertanian

b. Revitalisasi Perbenihan dan Pembibitan

Setelah lahan dan air maka dalam aspek budidaya ketersediaan benih dan bibit unggul merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Perpaduan antara lahan yang subur dengan benih/bibit yang unggul akan memproduksi/melahirkan produksi yang unggul. Secara historis peran benih unggul telah dibuktikan pada saat keberhasilan dalam peningkatan produksi pada era Revolusi Hijau ditahun 1960-an, dan keberhasilan swasembada beras dan jagung yang dicapai baru-baru ini antara lain juga karena penggunaan benih unggul. Dengan demikian untuk mencapai dan mempertahankan swasembada pangan yang berkelanjutan maka perangkat perbenihan/perbibitan harus kuat. Untuk memperbaiki perangkat perbenihan/perbibitan maka upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Menata kembali kelembagaan perbenihan/perbibitan nasional mulai dari tingkat pusat sampai di daerah.

- 2) Melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul lokal.
- 3) Mendorong sektor swasta untuk ikut berpartisipasi dalam usaha pengembangan bibit/benih.
- 4) Memperkuat tenaga tenaga pemuliaan di berbagai stratra/tingkat pendidikan.
- 5) Membentuk penangkar-penangkar benih unggul di tingkat lapangan
- 6) Memperbanyak/ekstensifikasi sumber-sumber bibit unggul baik dari sumber lokal maupun dari luar negeri.
- 7) Penerapan undang-undang perbenihan/perbibitan.

c. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana

Jalan usaha tani sangat penting meningkatkan efisiensi usaha tani terutama dalam hal pengangkutan sarana produksi dan hasil panen. Upaya untuk membuat jalan usaha tani dan jalan tingkat desa perlu terus dilakukan. Untuk hal ini koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah setempat sangat diperlukan terutama untuk membuka akses ke daerah sentra produksi pertanian. Untuk mengarah ke pertanian yang industrial, penggunaan alat dan mesin pertanian tidak dapat dihindari karena penggunaan alat dan mesin dapat meningkatkan efisiensi usaha pertanian. Untuk memberikan penyediaan dan pelayanan alsin secara tepat kepada petani maka beberapa upaya perlu dilakukan adalah :

- 1) Memperkuat kelembagaan alsin di pusat yang bertujuan untuk membuat kebijakan dan regulasi berkaitan dengan pembuatan, penyebaran dan penggunaan alat mesin di tingkat petani secara bertanggung jawab.
- 2) Mendorong unsur swasta untuk mendesain, memproduksi dan menyebarkan alsin sesuai dengan kualitas standar nasional.
- 3) Bekerjasama dengan sektor terkait untuk mendorong terbentuknya fasilitas bengkel-bengkel alsin di daerah.
- 4) Mengusahakan skim bantuan permodalan dalam pengadaan aslin di tingkat petani.

d. Revitalisasi Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumberdaya yang sangat vital karena merupakan pelaku utama pembangunan, termasuk pertanian. Tanpa pelaku yang handal dan berkompeten, maka pembangunan pertanian tidak dapat berjalan secara optimal. Kementerian Pertanian mengembangkan berbagai kegiatan bagi peningkatan sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan, pelatihan, magang, dan sekolah lapang. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini diperuntukkan bagi petani dan aparatur pertanian.

Penyuluh pertanian merupakan aparatur pertanian yang paling dekat tugasnya dengan petani. Namun demikian sejak otonomi keberadaan dan kelembagaan penyuluh menjadi lemah karena perhatian pemerintah daerah yang sangat beragam dan selain usia para penyuluh rata-rata sudah mendekati masa purna bakti. Sejak era otonomi daerah, perekrutan tenaga penyuluh tidak pernah dilakukan secara serius, akibatnya jumlah dan kualitasnya sangat menurun. Mengingat pentingnya tenaga penyuluh di lapangan serta kondisi keberadaannya maka pada masa 2005-2009 telah dilakukan perekrutan dalam bentuk Tenaga Harian Lepas (THL) karena keterbatasan untuk mendapat formasi pegawai negeri sipil.

- 1) Untuk memperkuat sistem penyuluhan di masa yang akan datang maka upaya upaya yang perlu dilakukan adalah :
- 2) Meningkatkan jumlah formasi penyuluh di daerah.
- 3) Mendorong munculnya tenaga penyuluh swadaya.
- 4) Memberikan bimbingan teknis dan usahatani produktif termasuk dalam mengakses informasi teknologi dan informasi pasar.
- 5) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan rekrutmen dan pembiayaan tenaga penyuluh daerah.

e. Revitalisasi Pembiayaan Petani

Kendala yang dialami petani utamanya petani menengah kebawah adalah akses terhadap permodalan. Hal ini disebabkan karena masalah klasik yaitu tidak adanya jaminan/agunan yang dipersyaratkan perbankan. Pada kondisi ini petani terpaksa berhubungan dengan rentenir yang sudah barang tentu dengan bunga yang sangat mencekik. Untuk memperbaiki kendala ini maka upaya-upaya yang selama ini dilakukan perlu diteruskan seperti :

- 1) Penyediaan skim perkreditan dengan kemudahan proses administrasi seperti KKP-E, KPEN-RP, KUPS.
- 2) Memperluas skim baru yang lebih mudah.
- 3) Menumbuhkan kelembagaan ekonomi mikro di pedesaan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi di pusat dan di daerah untuk mempermudah petani dalam mengakses sumber pembiayaan koperasi termasuk skim pembiayaan yang sudah ada.
- 5) Menumbuhkan kembali koperasi khusus dibidang pertanian.

f. Revitalisasi Kelembagaan Petani

Kegiatan pertanian secara alami melibatkan sumberdaya manusia (petani) yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka untuk mempermudah melakukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok. Demikian juga melalui kelompok mereka akan menjadi kuat untuk bisa mengakses pasar dan informasi. Menyadari manfaat keberadaan kelompok tani maka ke depan upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Terus memperbanyak kelompok dan gabungan kelompok tani;

- 2) Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek budidaya maupun dalam aspek pemasaran;
- 3) Memperluas jenis kelompok tani sesuai dengan bidang usaha, misalnya kelompok PHT, IB, P3A, Revitbun dsb.;
- 4) Memperkuat modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok melalui pemberian bantuan modal, dan memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan.

g. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir

Hal yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi teknologi dan industri hilir adalah:

- 1) Meningkatkan kegiatan penelitian khususnya dalam rangka penciptaan inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan serta pemanfaatan sumberdaya lahan dan air
- 2) Mempercepat diseminasi hasil penelitian dengan mengoptimalkan kelembagaan pengkajian, diklat, penyuluhan, tenaga teknis pertanian lapangan dan kelembagaan petani
- 3) Mendorong pengembangan industri pengolahan pertanian di perdesaan secara efisien guna peningkatan nilai tambah dan daya saing di pasar dalam negeri dan internasional
- 4) Meningkatkan jaminan pemasaran dan stabilitas harga komoditas pertanian
- 5) Meningkatkan dan menjaga mutu dan keamanan pangan pada semua tahapan produksi mulai dari hulu sampai hilir

Pencapaian sasaran pembangunan tanaman pangan akan ditempuh melalui strategi Tujuh Gema Revitalisasi Pertanian. Ketujuh strategi pembangunan pertanian tersebut akan mempengaruhi tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Namun demikian, harus disadari bahwa ketujuh strategi tersebut melibatkan institusi pemerintah lainnya dan institusi non pemerintah. Untuk mewujudkan pencapaian Empat Sukses tersebut, orientasi peningkatan produksi menjadi alat (instrumen) utama yang diprioritaskan. Untuk itu, sebagai jaminan tambahan bagi petani atau pelaku usaha pertanian, pemerintah memberikan

stimulan baik berupa bantuan, subsidi ataupun insentif lainnya. Pemberian ini sebagai bagian dari meringankan biaya usaha dan sekaligus meningkatkan pendapatan.



Gambar 1. Hubungan Strategi dan Empat Sukses Kementerian Pertanian

Sumber : Dokumen Pedoman Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2012

Secara harfiah, peningkatan produksi diharapkan dapat memacu peningkatan pendapatan. Berkaitan dengan peningkatan produksi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menetapkan strategi pencapaian produksi tanaman pangan melalui empat strategi atau disebut dengan Catur Strategi Pencapaian

Produksi Tanaman Pangan yaitu:

1. Peningkatan produktivitas
2. Perluasan areal dan optimasi lahan
3. Penurunan konsumsi beras dan pengembangan diversifikasi pangan

4. Peningkatan manajemen.

Catur strategi pencapaian produksi tanaman pangan ini merupakan penajaman sekaligus revisi atas catur strategi yang selama ini digunakan yaitu 1) peningkatan produktivitas, 2) perluasan areal tanam, 3) pengamanan produksi, dan 4) penguatan kelembagaan dan pembiayaan. Hal ini dilakukan sebagai proses penegasan dan respon atas perubahan lingkungan yang terjadi.

Proses penajaman dan revisi terhadap strategi pencapaian produksi tanaman pangan telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan program pembangunan tanaman pangan dan aspek keterpaduan baik disisi hulu, *on-farm*, maupun hilir.



Gambar 2. Catur Strategi Pencapaian Produksi Tanaman Pangan

Sumber : Dokumen Pedoman Pelaksanaan Program Direkotrat Jenderal Tanaman Pangan 2012

7. Strategi Peningkatan Hasil Pertanian Tanaman Pangan

Strategi dalam pembangunan pertanian dapat diartikan sebagai suatu rangkaian dari suatu perencanaan kegiatan dalam pembangunan pertanian. Strategi pembangunan pertanian sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian secara berkelanjutan. Pembangunan pertanian mencakup pembangunan tanaman pangan dan tanaman perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju dan tangguh (Sudiyono, 1997:4).

Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja, menunjang pembangunan industri dan meningkatkan ekspor produk pertanian. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi (Soekartawi, 1993:165). Selain itu, seiring berkembangnya zaman penggunaan teknologi menjadi suatu inovasi dalam meningkatkan hasil pertanian dan menjadi solusi dalam proses produksi. Maka dari itu dalam peningkatan produksi pertanian diperlukan adanya mekanisasi dengan cara memodernisasi alat produksi pertanian.

Untuk meningkatkan hasil pertanian dapat dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

a. Intensifikasi

Intensifikasi adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan

berbagai sarana. Program intensifikasi pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan produksi pertanian per kesatuan luas (Soekartawi, 1993:35). Intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan lahan pertanian yang ada sehingga hasil pertanian dapat semakin meningkat. Intensifikasi pertanian banyak dilakukan di pulau jawa dan bali karena lahan pertanian yang sempit.

Intensifikasi pertanian menjadi tumpuan bagi peningkatan produksi pangan nasional. Pada awalnya intensifikasi pertanian ditempuh dengan program Panca Usaha Tani, yang kemudian dilanjutkan dengan program sapta usaha tani. Adapun sapta usaha tani dalam bidang pertanian meliputi kegiatan sebagai berikut : Pengolahan tanah yang baik, Pengairan yang teratur, Pemilihan bibit unggul, Pemupukan, Pemberantasan hama dan penyakit tanaman, Pengolahan pasca panen.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hasil pertanian melalui program intensifikasi seperti program Bimbingan Massal (BIMAS), Intensifikasi Massal (INMAS), Intensifikasi Khusus (INSUS), Operasi Khusus (OPSUS). Insus dan Opsus lebih menekankan pada peningkatan partisipasi petani secara kelompok dan aparat pembina dalam meningkatkan produksi. Insus merupakan upaya intensifikasi kelompok guna meningkatkan potensi lahan, sedangkan opsus merupakan upaya menjangkau lahan yang belum diintensifikasi dan mencoba memberi rangsangan dalam peningkatan produksi (<http://www.pustakasekolah.com/revolusi-hijau.html>) diakses pada tanggal 15 April 2013.

Peningkatan Mutu Intensifikasi Pertanian dilakukan oleh pemerintah Kota Batu ditujukan untuk memperoleh hasil pertanian yang semakin meningkat. Sasaran dari strategi peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) adalah memberikan pelayanan yang lebih baik untuk petani, antara lain tentang informasi teknologi baru; mempermudah, memperlancar, membantu penyaluran atau penyediaan pupuk, benih, kredit dan sarana produksi. Peningkatan Mutu Intensifikasi Pertanian yang dilakukan dinas dengan penerapan sapta usaha tani dan optimalisasi penggunaan lahan pertanian. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian sebagai tindakan untuk membantu petani dalam proses produksi pertanian. Upaya-upaya peningkatan mutu intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu misalnya dengan pengembangan sistem perbenihan/pembibitan, pengendalian hama/penyakit tanaman pangan dan hortikultura serta pengembangan sistem dan usaha tani agribisnis.

Peningkatan mutu intensifikasi pertanian yang dilakukan mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh pada peningkatan mutu intensifikasi Adjud dalam (Supandi,2008:4) adalah :

1. Penggunaan benih yang mutunya sudah menurun;
2. Proteksi tanaman yang belum intensif;
3. Penyuluan yang belum intensif;
4. Tingkat penggunaan pupuk yang belum mencapai tingkat yang direkomendasikan;
5. Jaringan pengairan dan pengelolaan air di tingkat usahatani yang masih lemah;
6. Penyaluran sarana produksi yang belum mantap di wilayah unit desa.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, sasaran yang dituju dalam ekstensifikasi adalah lahan hutan, padang rumput, lahan gambut, atau bentuk-bentuk lain lahan marginal (terpinggirkan). Perluasan lahan pertanian dilakukan semakin sempitnya lahan-lahan produktif yang di alihfungsikan dalam proses pembangunan. Ekstensifikasi pertanian dilakukan untuk mencegah menurunnya produksi dan upaya untuk meningkatkan produksi pertanian.

Program ekstensifikasi masih memungkinkan untuk kondisi di luar pulau Jawa. Namun tidak demikian untuk kondisi di pulau Jawa Namun tidak demikian untuk kondisi di pulau Jawa. Mengingat semakin terbatasnya lahan sawah dan juga tingkat kepadatan penduduk di pulau jawa. Ekstensifikasi dapat dilakukan di pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua yang memiliki lahan yang luas.

c. Diversifikasi

Diversifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(<http://kbbi.web.id/diversifikasi>) diakses pada 15 Juli 2013 adalah :

- 1) Penganekaragaman
- 2) Penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi
- 3) Usaha untuk mengganti atau mendapatkan hasil pertanian yg bersifat monokultur ke arah pertanian yg bersifat multikultur
- 4) usaha memajukan industri pengolahan hasil pertanian

Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Diversifikasi pertanian atau penganekaragaman pertanian

adalah usaha untuk mengganti atau meningkatkan hasil pertanian yang *monokultur* (satu jenis tanaman) kearah pertanian yang bersifat *multikultur* (banyak macam) (Mubyarto, 1989: 255). Usaha diversifikasi pertanian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a) Tumpang sari

Tumpang sari adalah menanam sebidang tanah dengan berbagai tanaman dalam waktu yang bersamaan (Mubyarto, 1989:255). Penanaman dengan cara ini bisa dilakukan pada dua atau lebih jenis tanaman yang relatif seumur atau bisa juga pada beberapa jenis tanaman yang umurnya berbeda-beda. Penanaman tumpang sari yang dilakukan oleh petani mempunyai keuntungan diantaranya dapat meningkatkan produktivitas lahan. Peningkatan ini berarti peningkatan total produksi panen yang akan menaikkan pula pendapatan dari petani.

Sistem tanam tumpangsari mempunyai banyak keuntungan yang tidak dimiliki pada pola tanam *monokultur*. Beberapa keuntungan pada pola tumpang sari antara lain (Warsana, 2009):

- a) akan terjadi peningkatan efisiensi (tenaga kerja, pemanfaatan lahan maupun penyerapan sinar matahari),
- b) populasi tanaman dapat diatur sesuai yang dikehendaki,
- c) dalam satu areal diperoleh produksi lebih dari satu komoditas,
- d) tetap mempunyai peluang mendapatkan hasil manakala satu jenis tanaman yang diusahakan gagal dan
- e) kombinasi beberapa jenis tanaman dapat menciptakan beberapa jenis tanaman dapat menciptakan stabilitas biologis sehingga dapat menekan serangan hama dan penyakit serta mempertahankan kelestarian sumber daya lahan dalam hal ini kesuburan tanah.

b) Tumpang gilir

Tumpang gilir adalah menanam sebidang tanah dengan berbagai tanaman dalam waktu yang bergantian (Mubyarto, 1989:255). *Multiple cropping* (tumpang gilir), sebagai bentuk penggunaan lahan yang sama untuk memproduksi dua atau lebih tanaman per tahun, dipercaya sebagai bentuk paling tua dan umum dalam penyelenggaraan usahatani bagi petani di wilayah tropis. Pengertian *multiple cropping* mencakup beberapa sistem pertanaman yang secara aktual merupakan praktek diversifikasi tanaman dalam batas waktu dan/atau ruang. Ciri terpenting dari sistem *multiple cropping* adalah peningkatan diversitas dalam hal struktur habitat dan spesies. Satu contoh adalah sistem bertanam gilir (*sequential cropping*), atau rotasi tanaman (*crop rotation*), yang didalamnya terdapat dua atau lebih tanaman ditumbuhkan secara berurutan (bergiliran) pada lahan yang sama.

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi lahan merupakan suatu usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya (Wahono, 2002 : 3). Rehabilitasi adalah meningkatkan produksi pertanian dengan cara merehabilitasi fakta pendukung yang menentukan kegiatan produksi. Rehabilitasi dilakukan dengan memperbaiki lahan pertanian yang semula tidak produktif atau sudah tidak berproduksi menjadi lahan produktif atau mengganti

tanaman yang sudah tidak produktif menjadi tanaman yang lebih produktif dan memperbaiki cara bercocok tanam.

Pengembangan pertanian organik menjadi suatu kebutuhan yang harus diusahakan karena kondisi lahan pertanian yang semakin kritis. Lahan pertanian kritis dikarenakan penggunaan zat-zat kimia dalam tanah yang melibihi ambang batas. Pengembangan pertanian organik dan ramah lingkungan menjadi program prioritas di Kota Batu sebagai kota agropolitan.

Program Pengembangan pertanian organik diluncurkan oleh Walikota Batu pada Rabu, 12 Januari 2012 dalam sambutannya Walikota Batu Eddy Rumpoko mengatakan :

Model pertanian organik sebenarnya telah dilakukan oleh para generasi pendahulu kita seperti kakek nenek yang sangat mahir dan ahli dalam mengerjakan lahan pertanian dengan konsep alami atau mengambil bahan-bahan organik, seperti kompos, kotoran hewan, daun-daun dan sebagainya. “Model seperti ini yang harus tetap dan terus dikembangkan dalam bercocok tanam di era globalisasi sekarang ini. Dan kalau ini terus dikembangkan akan menghasilkan hasil pertanian yang sehat dikonsumsi dan tentu mendatangkan keuntungan yang cukup besar bagi masyarakat petani itu sendiri, karena segmen pasar yang membutuhkan hasil pertanian organik sangat meluas meski harganya lebih mahal.

Pada Tahun pertama program pertanian organik dengan membentuk kawasan pertanian organik. Program pengembangan kawasan pertanian organik ini dilakukan di 4 kawasan sebagai *pilot project* pengembangan pertanian organik. Kawasan pertanian organik tersebut adalah Desa Pendem sebagai kawasan padi organik serta Desa Sumberejo, Sumberbrantas dan Torongrejo sebagai kawasan sayuran organik. Program pengembangan kawasan organik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu akan dapat meningkatkan produksi padi dan tanaman hortikultura.

Selain penetapan kawasan organik berkenaan dengan belum optimalnya jaringan pengairan maka perlu diperbaiki/direhab agar pengairan ke lahan usaha tani dapat lebih lancar. Adapun jaringan yang perlu diperbaiki adalah Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jaringan Irigasi Tersier/Tingkat Usahatani (JITUT). JIDES adalah jaringan irigasi berskala kecil yang terdiri dari bangunan penangkap air (bendung, bangunan pengambilan), saluran dan bangunan pelengkap lainnya yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik dengan atau tanpa bantuan pemerintah. Sedangkan JITUT adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter, serta bangunan pelengkap pada jaringan irigasi pemerintah. Rehabilitasi JIDES dan JITUT dilakukan untuk memperbaiki/menyempurnakan jaringan irigasi desa (JIDES)/tingkat usaha tani (JITUT) guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula atau menambah luas areal pelayanan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan rehabilitasi JIDES/JITUS (Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air. 2009), yaitu :

1. Lokasi Rehabilitasi/perbaikan dilaksanakan di jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tingkat usaha tani dari daerah irigasi pemerintah atau desa yang mengalami kerusakan.
2. Untuk mendapatkan bagian-bagian dari jides/jitut yang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan, serta sketsa bagian-bagian jaringan yang perlu direhabilitasi, terlebih dahulu harus dilakukan survey investigasi yang dilakukan secara sederhana dengan melakukan penelusuran jaringan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi, bahwa lokasi merupakan Daerah Irigasi Desa/Daerah Irigasi Pemerintah yang jaringan irigasi tingkat usaha taninya mengalami kerusakan, mempunyai potensi intensitas pertanaman dapat ditingkatkan, tersedia petani pemilik/penggarap, lokasi harus didelinsi dengan

menunjukkan posisi koordinatnya (LU/LS, BT/BU). Sedangkan untuk petaninya adalah petani yang telah membentuk kelompok tani/P3A dan mempunyai semangat partisipatif, apabila belum ada agar segera membentuknya sebelum penetapan lokasi. Kelompok tani/P3A yang terpilih adalah yang belum pernah mendapatkan bantuan sejenis. Selain itu kelompok tani tersebut membutuhkan dan mau membangun serta memelihara JITUT/JIDES, dan sanggup menanam lahannya minimal 2x (dua kali) tanam dalam 1 (satu) tahun (padi-padi). Setelah calon lokasi dan calon petani ditetapkan, baru dilaksanakan survei investigasi.

3. Desain atau rancangan teknis sederhana dilaksanakan setelah survei investigasi, yang meliputi pengukuran dan penggambaran rencana kegiatan rehabilitasi JITUT/JIDES. Hasil desain sederhana ini berupa sket lokasi, gambar rancangan teknis sederhana kegiatan rehabilitasi, perkiraan kebutuhan bahan, peralatan dan biayanya. Apabila biaya yang tersedia tidak mencukupi, maka dilakukan pemilihan skala prioritas, yaitu bagian yang direhab adalah bagian dari jaringan yang paling memberikan manfaat.

Dalam kegiatan ini keterlibatan petani sangat diperlukan untuk memberikan masukan terhadap hasil survey investigasi dan desain sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan sekaligus untuk Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Kelompok (RUKK). Hasil SID dan RUKK yang disusun, berisikan rencana kegiatan kelompok serta rincian/uraian sumber biaya dari setiap komponen kegiatan baik dari dana yang dibantu pemerintah maupun kontribusi dari petani.

4. Perbaikan/rehabilitasi JIDES and JITUT adalah sebagai berikut :
 - a. Perbaikan/rehabilitasi JIDES meliputi rehabilitasi/perbaikan bangunan penangkal air, baik berupa bendung dan pengambilan bebas lainnya serta bangunan kelengkapannya, selain itu juga memperbaiki saluran termasuk lining saluran dan bangunan lainnya, seperti box bagi, siphon, talang, bangunan terjun, gorong-gorong, dsb.
 - b. Perbaikan/rehabilitasi JITUT meliputi perbaikan saluran tersier dan kwarter (termasuk lining saluran), perbaikan bangunan bagi kwarter dan bangunan lainnya, seperti siphon, talang, bangunan terjun, dsb. Apabila keadaan memaksa dan sangat dibutuhkan dapat dipergunakan untuk memperbaiki jaringan irigasi utama dan berkoordinasi dengan Dinas Pengairan setempat.
5. Partisipasi petani sangat diperlukan dalam segala aspek pengairan, dimana kelompok tani/P3A diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini sejak dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan sebagainya.
6. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat sesuai dengan yang telah direncanakan.
7. Monitoring, pelaporan, dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laporan pelaksanaan berisi tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) dan keuangan yang

disampaikan setiap bulan, triwulan, dan laporan akhir. Laporan akhir berisi tentang pelaksanaan kegiatan mulai SID sampai dengan pelaksanaan konstruksi. Sedangkan evaluasi dilaksanakan pada pertengahan /akhir tahun.

8. Seluruh kegiatan ini dibiayai oleh pemerintah, termasuk kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

e. Mekanisasi

Mekanisme pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mekanisasi adalah penggantian dan penggunaan tenaga mesin dan sarana-sarana teknik lainnya untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan (<http://kbbi.web.id/mekanisasi>) diakses 15 Juli 2013. Pada program mekanisasi pertanian, tenaga manusia dan hewan bukan menjadi tenaga utama dalam kegiatan pertanian. Sedangkan pengertian mekanisasi pertanian menurut Ananto (1985) :

Mekanisasi pertanian dalam arti luas adalah ilmu yang mempelajari penggunaan dan pemanfaatan bahan dan tenaga alam untuk mengembangkan daya kerja manusia dalam bidang pertanian. Mekanisasi pertanian dalam arti sempit adalah penggunaan alat dan mesin yang digerakkan oleh tenaga manusia, ternak dan mekanis, untuk melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan budidaya tanaman, panen, penanganan dan pengolahan hasil pertanian. Dengan demikian mekanisasi pertanian mempunyai arti yang luas dan tidak hanya sekedar penggunaan traktor saja, tetapi mencakup aspek pengkajian, penciptaan dan penggunaan semua peralatan dan mesin pertanian mulai dari panen sampai pasca panen.

Pengembangan alat dan mesin pertanian yang juga pengembangan mekanisasi pertanian tidak dapat berdiri sendiri, karena merupakan suatu sub sistem penunjang (*supporting system*) dalam proses budidaya, pengolahan dan penyimpanan. Sebagai teknologi yang bersifat *indivisible* (tidak dapat terbagi),

peran alat dan mesin pertanian tersebut sebaiknya dapat didistribusikan pada banyak pemakai, atau petani kecil yang tidak mempunyai cukup kemampuan untuk memilikinya. Berbagai studi menyebutkan, bahwa alat dan mesin pertanian memiliki kaitan sangat erat dengan dinamika sosial ekonomi dari sistem budidaya pertaniannya.

Menurut Handaka (2006:9) dalam paper “Kontribusi Mekanisasi Pertanian Dan Teknologi Pasca Panen Pada Sistem Dan Usaha Agribisnis” mengungkapkan bahwa :

Sumbangan alat dan mesin pertanian dalam pembangunan pertanian dapat diukur pada berbagai kasus, misalnya penggunaan pompa air tanah di Jawa Timur yang mampu merubah pola tanam dari padi-bero menjadi padi-padi atau padi-palawija palawija. Demikian pula penggunaan mesin perontok padi yang menurunkan susut panen dari $> 5\%$ menjadi kurang dari 2% . Penelitian terhadap perbaikan dan penyempurnaan mesin penggilingan padi mampu menaikkan rendemen giling cukup.

Kontribusi mekanisasi pertanian untuk tanaman pangan ditandai dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja pada pengolahan lahan, karena makin langkanya tenaga kerja manusia dan ternak pada daerah daerah beririgasi yang mempunyai intensitas tanam tinggi. Disamping itu, faktor budidaya tanam padi varietas unggul, memerlukan keserempakan tanam untuk dalam satu kawasan luas, untuk menghindari serangan hama dan memutus siklus hama. Oleh karena itu, volume pekerjaan menjadi meningkat waktu pengolahan lahan singkat sehingga jumlah curahan tenaga kerja untuk kegiatan tersebut meningkat.

Usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dengan perencanaan yang terpadu.

Pembangunan pertanian juga perlu didukung oleh penerapan mekanisasi pertanian. Dengan penerapan mekanisasi pertanian dalam proses pertanian yang tepat dan sesuai maka akan mempermudah dan mempercepat kerja petani dalam proses kegiatan *on farm* sampai *off farm*. Upaya untuk meningkatkan produksi hasil pertanian tanaman pangan dapat dilakukan melalui perbaikan produktivitas lahan, intensitas pertanian, perluasan area tanam, penurunan susut dan pasca panen, serta meningkatkan kualitas dan nilai tambah pengolahan tanaman pangan. Upaya-upaya tersebut dilakukan demi mencapai kembali swasembada berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional.

Peningkatan hasil pertanian dapat dilakukan dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan mekanisasi. Namun yang bisa dilakukan di Kota Batu adalah intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan mekanisasi. Penerapan ekstensifikasi tidak dapat dilakukan karena tidak mungkin untuk membuka lahan pertanian baru dengan membuka hutan. Maka dari itu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dengan intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan mekanisasi.